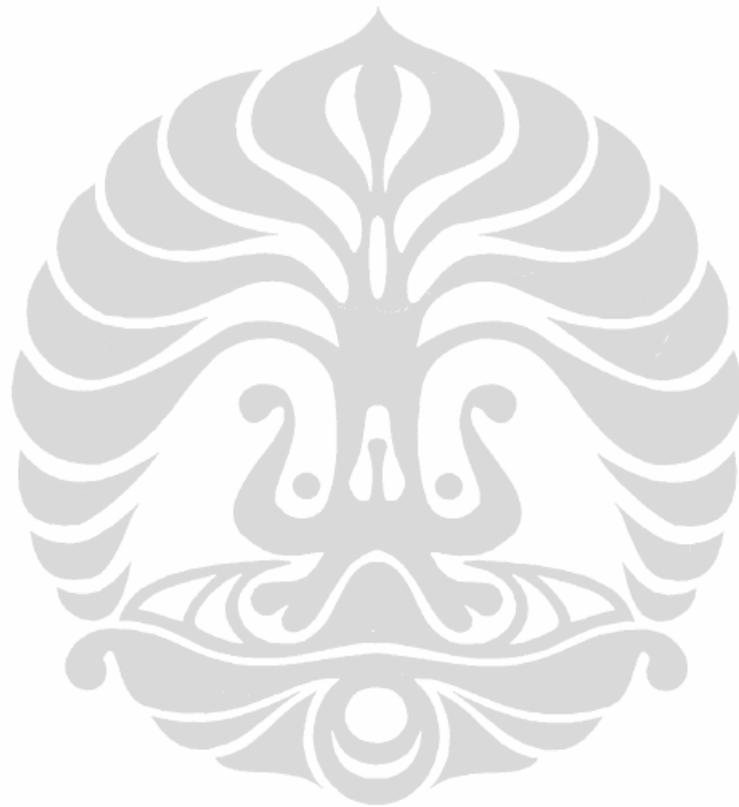


Lampiran

Matriks Pengembangan Instrumen

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode	Instrumen
1.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek transmisi dalam komunikasi b. Aspek kejelasan dalam komunikasi c. Aspek konsistensi dalam komunikasi d. Mekanisme koordinasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Aset - Seluruh pegawai di Bagian Aset - Pelaksana di 41 SKPD - Anggota DPRD Komisi A dan C 	<p>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</p> <p>Survei</p>	<p>Pedoman Wawancara terbuka</p> <p>Kuesioner</p>
2.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuantitas dan Kualitas staf b. Kewenangan yang dimiliki staf c. Informasi yang dimiliki staf d. Fasilitas baik fisik maupun financial 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Aset - Seluruh pegawai di Bagian Aset - Pelaksana di 41 SKPD - Anggota DPRD Komisi A dan C 	<p>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</p> <p>Survei</p>	<p>Pedoman Wawancara terbuka</p> <p>Kuesioner</p>
3.	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Respon implementor terhadap kebijakan (arah respon, macam tanggapan dan intensitas tanggapan) b. Pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Aset - Seluruh pegawai di Bagian Aset - Pelaksana di 41 SKPD - Anggota DPRD Komisi A dan C 	<p>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</p> <p>Survei</p>	<p>Pedoman Wawancara terbuka</p> <p>Kuesioner</p>
4.	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya SOP b. Kejelasan aturan/pembagian tugas dalam organisasi c. Pola-pola hubungan dalam organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Aset - Seluruh pegawai di Bagian Aset - Pelaksana di 41 SKPD - Anggota DPRD Komisi A dan C 	<p>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</p> <p>Survei</p>	<p>Pedoman Wawancara terbuka</p> <p>Kuesioner</p>
5.	Implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian implementasi kebijakan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris DPKAD - Kepala Bagian Aset - Kepala Seksi Mutasi Aset di Bagian Aset - Seluruh pegawai di Bagian Aset - Pelaksana di 41 SKPD - Anggota DPRD Komisi A dan C - 	<p>Wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>)</p> <p>Survei</p>	<p>Pedoman Wawancara terbuka</p> <p>Kuesioner</p>





UNIVERSITAS INDONESIA

KUESIONER PENELITIAN

**Informan: Pegawai Pengelola Aset Daerah Di Kota Tangerang,
Anggota DPRD Kota Tangerang (Komisi A dan Komisi C)**

**“STUDI PERSEPSI FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN ASET DI KOTA TANGERANG”**

**I N A Y A H
0806441283**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Publik**

**JAKARTA
Mei, 2010**

Penelitian ini merupakan bagian dari riset master (S2). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu karena telah bersedia meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membantu penelitian ini.

- Peneliti akan menjaga sepenuhnya KERAHASIAAN dari seluruh informasi yang diberikan oleh Bapak/Ibu termasuk juga identitas Bapak/Ibu.
- Kuesioner ini untuk melihat implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi/sikap pelaksana.
- Bapak/Ibu diminta untuk memberikan jawaban atau penilaian secara JUJUR dan OBYEKTIF sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu selama menjadi pegawai pelaksana pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang atau selama menjadi Anggota DPRD Kota Tangerang (Komisi A/C).
- Bapak/Ibu dimohon untuk membaca semua pertanyaan atau pernyataan secara SEKSAMA, dan menjawab semua pertanyaan atau pernyataan meskipun terdapat beberapa pertanyaan atau pernyataan yang hampir sama.

Data Informan

Nama :

Pekerjaan :

Golongan/Jabatan :

Instansi/Bagian/Komisi :

Pendidikan Formal Terakhir :

Masa Kerja : Tahun

Petunjuk:

Beri tanda (√) pada kotak jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi atau pengalaman Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju, Nilai = 5
ST = Setuju, Nilai = 4
RR = Ragu-ragu, Nilai = 3
TS = Tidak Setuju, Nilai = 2
STS = Sangat Tidak Setuju, Nilai = 1

1. KOMUNIKASI

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	ST	RR	TS	STS
K1	Berkenaan dengan pengelolaan aset, Komunikasi antara pejabat tingkat atas dengan pegawai dibawahnya berjalan efektif					
K2	Berkenaan dengan pengelolaan aset, Komunikasi antar pegawai pelaksana/pengelola aset di Kota Tangerang berjalan efektif					
K3	Berkenaan dengan pengelolaan aset, Komunikasi antara Pengelola Aset dengan instansi pemerintahan yang lain berjalan efektif					
K4	Komunikasi antara Pengelola Aset Kota Tangerang dengan DPRD berjalan efektif					
K5	Para pimpinan dan pegawai pelaksana pengelolaan aset Kota Tangerang mengetahui dengan jelas tugas dan fungsinya.					
K6	Pegawai pelaksana pengelolaan aset mengetahui dengan jelas kebijakan/ peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan aset di Kota Tangerang					
K7	Pegawai pelaksana pengelolaan aset mengetahui dengan jelas tujuan dan sasaran dari kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang.					
K8	Isi/substansi peraturan tentang bagaimana melaksanakan pengelolaan aset sudah cukup jelas.					
K9	Aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan aset mempunyai arahan/pedoman yang rinci dalam menguraikan tugas pokok beserta uraian kegiatan yang harus dilakukan					
K10	Penyampaian arahan/sosialisasi pedoman pelaksanaan pengelolaan aset telah sering dilakukan					
K11	Menurut pendapat saya, penjelasan dari pimpinan mengenai pelaksanaan pengelolaan aset telah cukup baik.					
K12	Dalam memberikan arahnya, pimpinan/pejabat tingkat atas kepada pejabat dibawahnya selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami					
K13	Saya selalu menerima informasi tentang bagaimana pengelolaan aset di Kota Tangerang, sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku					
K14	Petunjuk pelaksanaan pengelolaan aset sudah disampaikan secara lengkap dan jelas, dan dapat digunakan untuk melaksanakan pengelolaan aset secara efektif dan benar.					
K15	Arahan dari pimpinan/pejabat tingkat atas kepada pejabat dibawahnya cukup jelas dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset.					
K16	Sejauh yang saya ketahui, para pimpinan dan pegawai pelaksana pengelolaan aset mempunyai jadwal pertemuan atau rapat secara berkala terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aset.					
K17	Mempelajari secara seksama pedoman pelaksanaan pengelolaan aset adalah penting					
K18	Menurut pendapat saya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan/pejabat tingkat atas, sesuai dengan upaya melaksanakan pengelolaan aset secara lebih efektif					

K19	Menurut pendapat saya, arahan maupun kebijakan dari pimpinan/pejabat tingkat atas mengenai pengelolaan aset selalu sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang berlaku.					
K20	Hubungan/komunikasi antar para pengelola aset di Kota Tangerang cukup efektif					
K21	Para pengelola aset Kota Tangerang mempunyai jadwal yang teratur untuk mengadakan pertemuan/rapat guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan aset					
K22	Pertemuan/rapat terkait dengan pengelolaan aset di Kota Tangerang hanya dilakukan jika diperlukan.					
K23	Mekanisme koordinasi internal antar pegawai pengelola aset di Kota Tangerang berjalan efektif					
K24	Mekanisme koordinasi eksternal pengelola aset Kota Tangerang berjalan efektif					

2. SUMBER DAYA

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	ST	RR	TS	STS
SD25	Saya pernah membaca buku pedoman tentang pengelolaan aset daerah					
SD26	Saya memahami makna/substansi kebijakan pengelolaan aset Kota Tangerang.					
SD27	Saya pernah membaca informasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah					
SD28	Pengelola aset di Kota Tangerang mempunyai pegawai yang handal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya					
SD29	Kota Tangerang mempunyai pegawai yang handal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan aset daerah.					
SD30	Para pegawai pengelola aset harus dapat melaksanakan segala pekerjaan/tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada atasannya					
SD31	Para pegawai pengelola aset perlu diberikan insentif tambahan karena mempunyai tugas yang tidak ringan dalam pengelolaan aset daerah.					
SD32	Pegawai yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aset telah ditempatkan sesuai dengan kemampuan dari staf tersebut					
SD33	Setiap pegawai pengelola aset sudah mempunyai tugas dan wewenang yang jelas					
SD34	Pelatihan-pelatihan bagi pegawai pengelola aset diadakan secara rutin dan terarah					
SD35	Sarana pendukung untuk menyelesaikan tugas-tugas berkaitan dengan pengelolaan aset di Kota Tangerang sudah sesuai dengan kebutuhan					
SD36	Akses untuk memanfaatkan fasilitas yang terkait dengan kegiatan pengelolaan aset secara bersama-sama di Kota Tangerang cukup efektif.					
SD37	Dana/anggaran untuk kegiatan pengelolaan aset sudah cukup					

SD38	Jumlah personel yang menangani pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang sudah cukup dengan volume kegiatan/pekerjaan pengelolaan aset.					
SD39	Kapasitas personel yang menangani pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang sudah sesuai dengan kegiatan/pekerjaan pengelolaan aset.					
SD40	Kerjasama antar bagian di instansi saya dalam menangani masalah pengelolaan aset sering dilakukan					
SD41	Kerjasama antara instansi saya dengan instansi/pihak lain dalam pengelolaan aset sering dilakukan					

3. DISPOSISI/SIKAP

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	ST	RR	TS	STS
D42	Aset daerah merupakan bagian penting dari keuangan daerah					
D43	Pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien adalah hal yang penting					
D44	Saya menginginkan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/kebijakan yang telah ditetapkan					
D45	Isi kebijakan pengelolaan aset harus informatif.					
D46	Pegawai pengelola aset sudah berusaha bekerja sebaik-baiknya dalam tugas dan fungsinya dalam pengelolaan aset Kota Tangerang.					
D47	Para pegawai pengelola aset sudah berusaha bekerja sesuai arahan dan petunjuk pimpinan dalam pengelolaan aset Kota Tangerang					
D48	Para pegawai pengelola aset sudah mengerti dengan efektif arahan dari pejabat tingkat atas mengenai pengelolaan asset					
D49	Para pegawai pengelola aset sudah mengerti dengan benar kebijakan/peraturan yang mengatur pengelolaan aset di Kota Tangerang					
D50	Jika diperlukan, para pegawai pengelola aset dapat melakukan beberapa improvisasi dalam kegiatan pengelolaan aset, selama itu tidak melanggar kebijakan/peraturan yang berlaku					

4. STRUKTUR BIROKRASI

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	ST	RR	TS	STS
B51	Ada keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara instansi pelaksana kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang					
B52	Petunjuk pelaksanaan/manual pengelolaan aset sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan					
B53	Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset harus mempunyai arahan/pedoman yang rinci tentang tugas pokok beserta uraian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan					

B54	Keputusan/arahan pimpinan/pejabat tingkat atas kepada pegawai pelaksana pengelola aset konsisten dengan kebijakan pengelolaan aset daerah Kota Tangerang.					
B55	Harus ada aturan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan aset di Kota Tangerang					
B56	Ada <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap staf dalam melaksanakan pengelolaan aset					
B57	Setiap pegawai bagian aset harus mempunyai <i>job description</i> atau uraian pekerjaan yang jelas.					
B58	Tumpang tindih pekerjaan/tugas dalam pengelolaan aset sering terjadi					
B59	Kerjasama antara pegawai pelaksana dalam pengelolaan aset berjalan efektif.					
B60	Proses laporan dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pengelolaan aset berjalan efektif.					
B61	Tindak lanjut dari pelaporan ditangani dengan segera.					
B62	Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan pengelolaan aset berjalan efektif.					
B63	Kerjasama antara bagian aset dengan bagian lain terkait dengan pengelolaan aset berjalan efektif.					

5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

No.	Pertanyaan/Pernyataan	SS	ST	RR	TS	STS
I64	Terdapat peraturan daerah/peraturan walikota yang mengatur tentang pengelolaan aset daerah					
I65	Kegiatan-kegiatan pengelolaan aset di Kota Tangerang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan aset.					
I66	Kebijakan atau peraturan yang mengatur pengelolaan aset sudah cukup efektif untuk mengatur kegiatan-kegiatan pengelolaan aset.					
I67	Terdapat kesatuan penafsiran atas kebijakan/peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan aset.					
I68	Tugas-tugas pegawai pengelola aset Kota Tangerang terkait dengan pengelolaan aset sudah sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang pengelolaan aset daerah					
I69	Terdapat keseragaman langkah-langkah dalam pengelolaan aset di Kota Tangerang.					
I70	Masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan pada pedoman/manual pengelolaan aset yang berlaku					
I71	Arahan dari pejabat tingkat atas sudah sesuai dengan peraturan/kebijakan pengelolaan aset yang berlaku.					
I72	Pengawasan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset selalu dilakukan.					
I73	Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan aset selalu dilakukan					
I74	Tugas-tugas selalu dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.					
I75	Tersusun dokumen-dokumen pengelolaan aset yang sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku					

I76	Pengelolaan aset Kota Tangerang telah dapat mengamankan barang milik daerah/aset Kota Tangerang					
I77	Kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset Kota Tangerang efektif dalam memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah/aset daerah Kota Tangerang					
I78	Kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah Kota Tangerang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat					
I79	Akuntabilitas dalam pengelolaan barang/aset daerah Kota Tangerang telah terwujud.					
I80	Pengelolaan barang milik daerah/aset daerah Kota Tangerang yang tertib, efektif dan efisien telah terwujud.					



PEDOMAN WAWANCARA TERBUKA

INFORMAN: KEPALA BAGIAN ASET dan KEPALA SEKSI di BAGIAN ASET
DPKAD KOTA TANGERANG

Penelitian ini merupakan bagian dari riset master (S2). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan Pengelolaan Aset Daerah di Kota Tangerang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membantu penelitian ini.

Data Informan

Nama :
Pendidikan Formal Terakhir :
Masa Kerja : Tahun

KOMUNIKASI

- A.1 Apakah pejabat tingkat atas memberikan arahan/petunjuk dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang? Bagaimanakah pemberian arahan/petunjuk tersebut?
- A.2 Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan melewati lapisan-lapisan hirarki birokrasi?
- A.3 Apakah komunikasi dapat berjalan akurat dan dipahami oleh para pegawai/staf pelaksana?
- A.4 Apakah instruksi pelaksanaan yang diteruskan kepada para pegawai/staf pelaksana dapat diterima dengan jelas?
- A.5 Apakah penyampaian informasi kebijakan dapat selalu konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
- A.6 Apakah terdapat keputusan atau instruksi pelaksanaan yang saling bertentangan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset?
- A.7 Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan di DPKAD ataupun di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?

- A.8 Bagaimana pula kerjasama antar bagian di DPKAD atau di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?
- A.9 Faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat koordinasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?

SUMBER DAYA

- A.10 Bagaimana kuantitas dan kualitas staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.11 Bagaimana kewenangan yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.12 Bagaimana informasi yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.13 Bagaimana dukungan fasilitas baik fisik maupun financial dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.14 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan sumber daya dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.15 Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Bidang Aset?

DISPOSISI/SIKAP

- A.16 Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.17 Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?
- A.18 Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?
- A.19 Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan aset Kota Tangerang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

STRUKTUR BIROKRASI

- A.20 Apakah tersedia Standar Operating Procedures (SOP) dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

- A.21 Jika ada, bagaimanakah peranan SOP dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.22 Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
Apakah sudah ada kejelasan aturan mengenai hal ini?
- A.23 Bagaimana pola hubungan di antara pejabat tingkat atas dengan pejabat dibawahnya maupun dengan staf pelaksana, pola hubungan diantara pejabat tingkat atas, pola hubungan diantara staf pelaksana, maupun diantara bagian/pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- A.24 Apakah implementasi kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku?
- A.25 Apakah tugas-tugas Bapak sebagai Kepala DPKAD atau Kepala Bagian Aset di DPKAD sudah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku?
Misalnya penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, penyusunan dokumen yang ditetapkan sesuai peraturan pengelolaan aset, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset di Kota Tangerang?
- A.26 Dari hasil analisis Bapak, apa saja permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh DPKAD atau Bidang Aset dalam kaitannya dengan pengelolaan aset? Apa solusi atau jalan keluar yang dilakukan?

Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Aset, DPKAD Kota Tangerang

KOMUNIKASI

A.1 Apakah pejabat tingkat atas memberikan arahan/petunjuk dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD/Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang? Bagaimanakah pemberian arahan/petunjuk tersebut?

Jawaban:

Arahan dari pimpinan biasanya hanya secara garis besarnya saja. Semakin ke bawah semakin dibreakdown, sesuai dengan pelaksanaan tugas secara teknis. Visi misi, dituangkan secara bagus dalam bentuk aturan Perda (Peraturan Daerah). Kemudian Perda diturunkan menjadi Perwal (Peraturan Walikota).

A.2 Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan melewati lapisan-lapisan hirarki birokrasi?

Jawaban:

Sebagaimana umumnya dalam suatu instansi pemerintah, maka ada lapisan-lapisan atau garis hierarki sudah tentu harus dilewati. Lapisan bawah dalam bentuk draft/teknis, SKDP lain yang terkait.

A.3 Apakah komunikasi dapat berjalan akurat dan dipahami oleh para pegawai/staf pelaksana?

Jawaban:

Sering dikomunikasikan. Ada pertemuan setiap Senin.

A.4 Apakah instruksi pelaksanaan yang diteruskan kepada para pegawai/staf pelaksana dapat diterima dengan jelas?

Jawaban:

Tergantung basic (pendidikan) staf pelaksana. Namun dengan sering dikomunikasikan, juga sebagai pimpinan di Bagian Aset lebih mudah bagi saya untuk memberikan pengarahan langsung kepada para pegawai pelaksana di bagian saya.

A.5 Apakah penyampaian informasi kebijakan dapat selalu konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya harus, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

A.6 Apakah terdapat keputusan atau instruksi pelaksanaan yang saling bertentangan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban :

Selama ini tidak ada yang signifikan bertentangan. Hal ini sangat mendukung dalam pengendalian manajemen.

A.7 Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan di DPKAD ataupun di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban:

Pejabat yang bekerja untuk DPKAD adalah Sekretaris DPKAD, sedangkan yang berkeja untuk SKPD adalah orangnya Pemda dalam pengelolaan aset.

A.8 Bagaimana pula kerjasama antar bagian di DPKAD atau di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban:

Baik. Perlu persamaan persepsi bahwa aset itu tidak bisa lepas dari keuangan.

Langkah-langkah yang kami tempuh sejak 2001, kami menyatukan keuangan dan aset dalam sebuah lembaga yang dinamakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuannya untuk menyamakan persepsi.

A.9 Faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat koordinasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD/Bagian Aset DPKAD?

Jawaban:

Faktor penghambat adalah pola pikir/*mind-set* dalam praktek.

Awalnya sangat kesulitan, karena untuk menyamakan persepsi diperlukan komunikasi, maka komunikasi menjadi kata kunci di dalam keberhasilan program ini. Harus diakui kalau keuangan dan aset terpisah, ada dua kendala utama, yaitu:

- terjadi perbedaan data
- perbedaan dalam cara memandang aset, maksudnya orang aset memandang aset itu sebagai aset (sebagai alat), bukan totalitas. Tetapi kalau orang keuangan menitikberatkan pada efisiensi.

SUMBER DAYA

A.10 Bagaimana kuantitas dan kualitas staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

SDM menjadi kunci. Awalnya kami mencari SDM tidak muluk-muluk. Minimal walaupun bukan SDM berbasis aset, tapi secara teknis mereka bisa melaksanakan tugas yang diperintahkan. Yang lebih bagus sebenarnya sdm yang ditetapkan harus benar-benar mengetahui soal aset. Misalnya sdm yang mendapatkan pendidikan bendahara barang.

Pelatihan aset, bintek 2007, bintek 2009, dengan sasaran SKPD.

A.11 Bagaimana kewenangan yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Kewenangannya ya... bagi-bagi tugas

A.12 Bagaimana informasi yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Cukup baik.

Tentu saja SDM diberi bimbingan teknis dan pembinaan langsung. Outputnya Kota Tangerang dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

A.13 Bagaimana dukungan fasilitas baik fisik maupun financial dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Sudah cukup.

Para pegawai pelaksana mendapat insentif sesuai dengan Perwal.

A.14 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan sumber daya dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

SDM cukup, inovasi baru. Perhatikan basic pendidikan. Tidak ada jurusan aset daerah...

A.15 Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Bidang Aset?

Jawaban:

Memaksimalkan sistem, misalnya dengan software/komputerisasi.

DISPOSISI/SIKAP

A.16 Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Sebagai birokrasi harus mendukung.

A.17 Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawaban:

Kesempatan banyak, sekarang pada tahap pembenahan.

Meski permendagri no 17 telah menjadi dasar, namun masih diperlukan inovasi, karena antar Pemda tidak sama dalam menerapkan model dalam pengelolaan aset. Misalnya Kota Tangerang membuat tambahan formulir untuk melengkapi administrasi pengelolaan aset disamping adanya perda no 10/2007 dan perwal no 10/2007 tentang sistem dan prosedur pengelolaan aset.

Inovasi tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi yang berguna untuk pencatatan keuangan. Menyambung kepentingan manajemen aset dengan standar akuntansi pemerintahan. Di pemda lain belum sampai kesana. Makanya banyak pemda lain yang studi banding atau belajar ke Kota Tangerang, karena sampai hari ini baru sebatas harga barang, sementara PP No 24 menghendaki lebih dari itu, yaitu harga perolehan plus biaya-biaya yang tercatat secara baik.

A.18 Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?

Jawaban:

Sesuai dengan STOK masing-masing. SOP belum ada masih dalam proses penyusunan.

A.19 Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan aset Kota Tangerang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

Jawaban:

Eselon IV sudah ada kewenangan sesuai dengan Perda yang menyangkut Organisasi Pemerintah Daerah.

STRUKTUR BIROKRASI

A.20 Apakah tersedia Standar Operating Procedures (SOP) dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Masih dalam proses.

A.21 Jika ada, bagaimanakah peranan SOP dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Jelas akan sangat membantu, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- A.22 Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Apakah sudah ada kejelasan aturan mengenai hal ini?

Jawaban:

Jelas, karena struktur birokrasi memang seperti itu. Sudah sesuai dengan STOK masing-masing dan Perda/Perwal mengenai pengelolaan aset.

- A.23 Bagaimana pola hubungan di antara pejabat tingkat atas dengan pejabat dibawahnya maupun dengan staf pelaksana, pola hubungan diantara pejabat tingkat atas, pola hubungan diantara staf pelaksana, maupun diantara bagian/pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Selama sesuai dengan organisasi perangkat daerah, memiliki hirarki birokrasi, walaupun pada prakteknya tidak selalu kaku. Pertemuan mingguan yang ada di Bagian Aset merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi dan pengarahan dari pejabat tingkat atas kepada pegawai di bawahnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- A.24 Apakah implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku?

Jawaban:

Sudah. Semua sistem dan prosedur pengelolaan aset dilakukan sesuai Perwal No.10 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- A.25 Apakah tugas-tugas Bapak sebagai Kepala DPKAD atau Kepala Bagian Aset di DPKAD sudah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku? Misalnya penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, penyusunan dokumen yang ditetapkan sesuai peraturan pengelolaan aset, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Yah...memang itu semua harus dikerjakan, dilaksanakan sesuai dengan Perda yang berlaku.

- A.26 Dari hasil analisis Bapak, apa saja permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh DPKAD atau Bidang Aset dalam kaitannya dengan pengelolaan aset? Apa solusi atau jalan keluar yang dilakukan?

Jawaban:

- A.27 Menurut Bapak, apakah tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah yaitu mengamankan barang milik daerah; menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah; menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien, sudah dapat tercapai?

Lampiran Ringkasan Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi di Bagian Aset, DPKAD Kota Tangerang

KOMUNIKASI

A.1 Apakah pejabat tingkat atas memberikan arahan/petunjuk dalam rangka implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD/Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang? Bagaimanakah pemberian arahan/petunjuk tersebut?

Jawaban:

Ya. Pemberian arahan dari pimpinan kami sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

A.2 Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan melewati lapisan-lapisan hirarki birokrasi?

Jawaban:

Melalui sosialisasi dan pengarahan langsung dari pejabat di atas, sesuai garis struktur organisasi.

A.3 Apakah komunikasi dapat berjalan akurat dan dipahami oleh para pegawai/staf pelaksana?

Jawaban:

Ya.

A.4 Apakah instruksi pelaksanaan yang diteruskan kepada para pegawai/staf pelaksana dapat diterima dengan jelas?

Jawaban:

Pada umumnya iya, tetapi ada kalanya perlu dikomunikasikan kembali jika ada yang belum jelas.

A.5 Apakah penyampaian informasi kebijakan dapat selalu konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku?

Jawaban:

Ya, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

A.6 Apakah terdapat keputusan atau instruksi pelaksanaan yang saling bertentangan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban :

Tidak ada. Semua sejalan, tidak saling bertentangan.

A.7 Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan kedinasan di DPKAD ataupun di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban:

A.8 Bagaimana pula kerjasama antar bagian di DPKAD atau di Bagian Aset DPKAD Kota Tangerang dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset?

Jawaban:

Baik. Karena sama-sama berada dalam satu dinas.

A.9 Faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat koordinasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD/Bagian Aset DPKAD?

Jawaban:

Hambatan dalam koordinasi biasanya masalah komunikasi saja.

SUMBER DAYA

A.10 Bagaimana kuantitas dan kualitas staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Cukup baik.

Walaupun secara kuantitas sebenarnya perlu ditambah, terutama sdm yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

A.11 Bagaimana kewenangan yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

A.12 Bagaimana informasi yang dimiliki staf dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Cukup baik.

A.13 Bagaimana dukungan fasilitas baik fisik maupun financial dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Cukup baik.

A.14 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan sumber daya dalam rangka efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

SDM secara kuantitas perlu ditambah, tetapi harus sesuai dengan latar belakang pendidikan, misalnya Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer untuk data.

A.15 Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Bidang Aset?

Jawaban:

DISPOSISI/SIKAP

A.16 Bagaimana sikap atau tanggapan staf pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Sangat mendukung.

A.17 Apakah ada kebebasan bertindak atau melakukan improvisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa kebebasan itu diberikan?

Jawaban:

Selama ini sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

A.18 Bagaimana komitmen atau kesepakatan para pelaksana kebijakan dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Jika ada dalam bentuk apa komitmen itu dituangkan?

Jawaban:

Sangat mendukung.

A.19 Bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaksana mengenai kebijakan pengelolaan aset Kota Tangerang? Apakah substansi kebijakan seperti tujuan, target, arah dan sasaran kebijakan tersebut sudah dipahami dengan baik?

Jawaban:

Kalau yang teknis-teknis sudah dipahami, tapi kalau arah dan tujuan yang jelas untuk keseragaman dan pengelolaan yang lebih baik.

STRUKTUR BIROKRASI

A.20 Apakah tersedia Standar Operating Procedures (SOP) dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

(Kurang Tahu)

A.21 Jika ada, bagaimanakah peranan SOP dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Jelas akan sangat membantu, sehingga akan ada standar baku yang menjadi pegangan petugas pelaksana..

A.22 Bagaimana pembagian fungsi, tugas dan wewenang diantara pihak/instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang? Apakah sudah ada kejelasan aturan mengenai hal ini?

Jawaban:

Sesuai dengan STOK masing-masing dan Perda/Perwal mengenai pengelolaan aset.

A.23 Bagaimana pola hubungan di antara pejabat tingkat atas dengan pejabat dibawahnya maupun dengan staf pelaksana, pola hubungan diantara pejabat tingkat atas, pola hubungan diantara staf pelaksana, maupun diantara bagian/pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Baik. Sesuai dengan lapisan birokrasi yang bertingkat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A.24 Apakah implementasi kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku?

Jawaban:

Ya. Sesuai dengan Perda no 10 Tahun 2007

A.25 Apakah tugas-tugas Bapak sebagai Kepala Seksi Mutasi Aset sudah sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku?

Misalnya penetapan usulan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan, penyusunan dokumen yang ditetapkan sesuai peraturan pengelolaan aset, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset di DPKAD Kota Tangerang?

Jawaban:

Ya. Sesuai tupoksi kami.

A.26 Dari hasil analisis Bapak, apa saja permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi oleh DPKAD atau Bidang Aset dalam kaitannya dengan pengelolaan aset? Apa solusi atau jalan keluar yang dilakukan?

Jawaban:

A.27 Menurut Bapak, apakah tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan barang milik daerah/aset daerah yaitu mengamankan barang milik daerah; menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah; menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien, sudah dapat tercapai?

Lampiran Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas dengan Aplikasi SPSS versi 15,0

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	24

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Komunikasi 1	89,68	87,498	,491	,905
Komunikasi 2	89,75	86,572	,559	,904
Komunikasi 3	90,05	85,325	,595	,903
Komunikasi 4	90,53	84,771	,499	,906
Komunikasi 5	89,75	83,089	,694	,901
Komunikasi 6	89,86	86,981	,482	,906
Komunikasi 7	89,88	88,003	,493	,905
Komunikasi 8	89,83	87,040	,558	,904
Komunikasi 9	89,76	87,460	,607	,903
Komunikasi 10	89,78	86,520	,522	,905
Komunikasi 11	89,75	88,434	,499	,905
Komunikasi 12	89,59	87,728	,662	,903
Komunikasi 13	89,83	85,109	,724	,901
Komunikasi 14	89,73	87,132	,576	,904
Komunikasi 15	89,83	88,109	,516	,905
Komunikasi 16	90,05	84,118	,625	,902
Komunikasi 17	89,32	95,912	-,183	,916
Komunikasi 18	89,61	91,173	,206	,911
Komunikasi 19	89,81	86,430	,549	,904
Komunikasi 20	89,92	85,631	,677	,902
Komunikasi 21	89,90	84,231	,631	,902
Komunikasi 22	90,63	90,169	,174	,915
Komunikasi 23	90,03	83,964	,703	,901
Komunikasi 24	90,07	84,926	,665	,902

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber Daya

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,857	17

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sumber Daya 25	61,29	40,829	,494	,848
Sumber Daya 26	61,69	38,181	,748	,836
Sumber Daya 27	61,54	40,977	,477	,849
Sumber Daya 28	61,81	40,016	,477	,849
Sumber Daya 29	61,66	40,538	,556	,846
Sumber Daya 30	61,25	44,193	,111	,861
Sumber Daya 31	60,98	42,189	,358	,854
Sumber Daya 32	61,86	39,499	,503	,847
Sumber Daya 33	61,59	41,487	,514	,848
Sumber Daya 34	61,59	42,728	,193	,862
Sumber Daya 35	61,93	37,719	,683	,838
Sumber Daya 36	61,98	37,431	,685	,837
Sumber Daya 37	62,24	39,357	,462	,850
Sumber Daya 38	62,10	41,472	,305	,857
Sumber Daya 39	62,08	40,872	,398	,852
Sumber Daya 40	61,76	39,357	,548	,845
Sumber Daya 41	61,83	38,557	,499	,848

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Disposisi/Sikap**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Disposisi/Sikap 42	33,54	8,528	,432	,746
Disposisi/Sikap 43	33,69	8,216	,440	,743
Disposisi/Sikap 44	33,71	8,036	,547	,730
Disposisi/Sikap 45	33,93	8,237	,325	,762
Disposisi/Sikap 46	34,00	7,759	,565	,724
Disposisi/Sikap 47	34,05	7,739	,489	,735
Disposisi/Sikap 48	34,42	7,352	,611	,714
Disposisi/Sikap 49	34,46	7,597	,453	,742
Disposisi/Sikap 50	34,49	8,496	,231	,778

d. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Struktur Birokrasi**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,796	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Struktur Birokrasi 51	48,31	17,009	,433	,782
Struktur Birokrasi 52	48,20	16,958	,384	,786
Struktur Birokrasi 53	47,97	17,102	,493	,778
Struktur Birokrasi 54	48,03	16,964	,379	,786
Struktur Birokrasi 55	47,86	17,085	,449	,781
Struktur Birokrasi 56	48,00	15,759	,554	,769
Struktur Birokrasi 57	47,81	16,913	,476	,778
Struktur Birokrasi 58	48,54	18,356	,074	,819
Struktur Birokrasi 59	48,39	16,207	,586	,768
Struktur Birokrasi 60	48,27	17,753	,267	,795
Struktur Birokrasi 61	48,32	15,843	,555	,769
Struktur Birokrasi 62	48,32	15,877	,548	,770
Struktur Birokrasi 63	48,41	16,797	,448	,780

e. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,920	17

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Implementasi Kebijakan 64	64,29	47,657	,649	,914
Implementasi Kebijakan 65	64,49	48,151	,624	,915
Implementasi Kebijakan 66	64,66	47,056	,739	,912
Implementasi Kebijakan 67	64,93	47,547	,665	,914
Implementasi Kebijakan 68	64,61	47,897	,664	,914
Implementasi Kebijakan 69	64,73	46,856	,633	,915
Implementasi Kebijakan 70	64,56	50,147	,544	,917
Implementasi Kebijakan 71	64,75	49,262	,663	,915
Implementasi Kebijakan 72	64,73	48,442	,636	,915
Implementasi Kebijakan 73	64,75	48,400	,627	,915
Implementasi Kebijakan 74	64,86	48,809	,613	,915
Implementasi Kebijakan 75	64,61	48,587	,775	,912
Implementasi Kebijakan 76	64,63	47,928	,617	,915
Implementasi Kebijakan 77	64,71	50,726	,340	,923
Implementasi Kebijakan 78	64,51	53,220	,111	,927
Implementasi Kebijakan 79	64,71	46,967	,763	,911
Implementasi Kebijakan 80	64,86	45,878	,723	,912

Hasil Uji Frekuensi Karakteristik Responden dengan Aplikasi SPSS versi 15,0

Jenis Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	54	91,5	91,5	91,5
	DPRD	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Golongan PNS dan Komisi DPRD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gol I	2	3,4	3,4	3,4
	Gol II	23	39,0	39,0	42,4
	Gol III	28	47,5	47,5	89,8
	Gol IV	1	1,7	1,7	91,5
	Komisi A	3	5,1	5,1	96,6
	Komisi C	2	3,4	3,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Instansi/Bagian/DPRD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bagian Aset	41	69,5	69,5	69,5
	SKPD	13	22,0	22,0	91,5
	DPRD	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Pendidikan Formal Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTP	2	3,4	3,4	3,4
	SLTA	24	40,7	40,7	44,1
	D3	6	10,2	10,2	54,2
	S1	22	37,3	37,3	91,5
	S2	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang dari 10 tahun	22	37,3	37,3	37,3
	10 s/d 20 tahun	27	45,8	45,8	83,1
	Lebih dari 20 tahun	10	16,9	16,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Hasil Uji Frekuensi Tiap Variabel dengan Aplikasi SPSS versi 15,0

a. Hasil Uji Frekuensi Variabel Komunikasi

Komunikasi 1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
Ragu-ragu	2	3,4	3,4	8,5
Setuju	40	67,8	67,8	76,3
Sangat Setuju	14	23,7	23,7	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
Ragu-ragu	4	6,8	6,8	11,9
Setuju	40	67,8	67,8	79,7
Sangat Setuju	12	20,3	20,3	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	6,8	6,8	6,8
Ragu-ragu	15	25,4	25,4	32,2
Setuju	33	55,9	55,9	88,1
Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Tidak Setuju	12	20,3	20,3	22,0
Ragu-ragu	22	37,3	37,3	59,3
Setuju	19	32,2	32,2	91,5
Sangat Setuju	5	8,5	8,5	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	4	6,8	6,8	6,8
Ragu-ragu	7	11,9	11,9	18,6
Setuju	31	52,5	52,5	71,2
Sangat Setuju	17	28,8	28,8	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
	Ragu-ragu	10	16,9	16,9	22,0
	Setuju	35	59,3	59,3	81,4
	Sangat Setuju	11	18,6	18,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	12	20,3	20,3	22,0
	Setuju	38	64,4	64,4	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	8	13,6	13,6	16,9
	Setuju	40	67,8	67,8	84,7
	Sangat Setuju	9	15,3	15,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	6	10,2	10,2	11,9
	Setuju	43	72,9	72,9	84,7
	Sangat Setuju	9	15,3	15,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
	Ragu-ragu	7	11,9	11,9	16,9
	Setuju	36	61,0	61,0	78,0
	Sangat Setuju	13	22,0	22,0	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	6	10,2	10,2	11,9
	Setuju	42	71,2	71,2	83,1
	Sangat Setuju	10	16,9	16,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	3	5,1	5,1	5,1
	Setuju	42	71,2	71,2	76,3
	Sangat Setuju	14	23,7	23,7	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	3,4
	Ragu-ragu	5	8,5	8,5	11,9
	Setuju	45	76,3	76,3	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	7	11,9	11,9	13,6
	Setuju	39	66,1	66,1	79,7
	Sangat Setuju	12	20,3	20,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	6	10,2	10,2	13,6
	Setuju	44	74,6	74,6	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	10,2	10,2	10,2
	Ragu-ragu	12	20,3	20,3	30,5
	Setuju	33	55,9	55,9	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
	Ragu-ragu	7	11,9	11,9	16,9
	Setuju	38	64,4	64,4	81,4
	Sangat Setuju	11	18,6	18,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 20

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	14	23,7	23,7	25,4
	Setuju	36	61,0	61,0	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 21

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
	Ragu-ragu	14	23,7	23,7	28,8
	Setuju	29	49,2	49,2	78,0
	Sangat Setuju	13	22,0	22,0	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 23

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	6,8
	Ragu-ragu	11	18,6	18,6	25,4
	Setuju	39	66,1	66,1	91,5
	Sangat Setuju	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Komunikasi 24

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	6,8	6,8	6,8
	Ragu-ragu	14	23,7	23,7	30,5
	Setuju	36	61,0	61,0	91,5
	Sangat Setuju	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

b. Hasil Uji Frekuensi Variabel Sumber Daya**Sumber Daya 25**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	5,1
	Setuju	35	59,3	59,3	64,4
	Sangat Setuju	21	35,6	35,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 26

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	12	20,3	20,3	22,0
	Setuju	38	64,4	64,4	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 27

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	4	6,8	6,8	10,2
	Setuju	43	72,9	72,9	83,1
	Sangat Setuju	10	16,9	16,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 28

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	3,4
	Ragu-ragu	16	27,1	27,1	30,5
	Setuju	34	57,6	57,6	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 29

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	10	16,9	16,9	18,6
	Setuju	41	69,5	69,5	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 31

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	3,4
	Setuju	20	33,9	33,9	37,3
	Sangat Setuju	37	62,7	62,7	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 32

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	5,1
	Ragu-ragu	17	28,8	28,8	33,9
	Setuju	32	54,2	54,2	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 33

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	5	8,5	8,5	10,2
	Setuju	47	79,7	79,7	89,8
	Sangat Setuju	6	10,2	10,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 35

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	6,8
	Ragu-ragu	18	30,5	30,5	37,3
	Setuju	31	52,5	52,5	89,8
	Sangat Setuju	6	10,2	10,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 36

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	13,6	13,6	13,6
	Ragu-ragu	13	22,0	22,0	35,6
	Setuju	33	55,9	55,9	91,5
	Sangat Setuju	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 37

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	10	16,9	16,9	16,9
	Ragu-ragu	24	40,7	40,7	57,6
	Setuju	20	33,9	33,9	91,5
	Sangat Setuju	5	8,5	8,5	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 38

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	8	13,6	13,6	13,6
	Ragu-ragu	17	28,8	28,8	42,4
	Setuju	32	54,2	54,2	96,6
	Sangat Setuju	2	3,4	3,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 39

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	10,2	10,2	10,2
	Ragu-ragu	20	33,9	33,9	44,1
	Setuju	31	52,5	52,5	96,6
	Sangat Setuju	2	3,4	3,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 40

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	4	6,8	6,8	6,8
	Ragu-ragu	11	18,6	18,6	25,4
	Setuju	36	61,0	61,0	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Sumber Daya 41

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	9	15,3	15,3	15,3
Ragu-ragu	7	11,9	11,9	27,1
Setuju	33	55,9	55,9	83,1
Sangat Setuju	10	16,9	16,9	100,0
Total	59	100,0	100,0	

c. Hasil Uji Frekuensi Variabel Disposisi/Sikap

Disposisi/Sikap 42

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	15	25,4	25,4	25,4
Sangat Setuju	44	74,6	74,6	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 43

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	1	1,7	1,7	1,7
Setuju	22	37,3	37,3	39,0
Sangat Setuju	36	61,0	61,0	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 44

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	25	42,4	42,4	42,4
Sangat Setuju	34	57,6	57,6	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 45

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	5	8,5	8,5	8,5
Setuju	28	47,5	47,5	55,9
Sangat Setuju	26	44,1	44,1	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 46

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-ragu	3	5,1	5,1	5,1
Setuju	36	61,0	61,0	66,1
Sangat Setuju	20	33,9	33,9	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 47

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	3	5,1	5,1	6,8
	Setuju	36	61,0	61,0	67,8
	Sangat Setuju	19	32,2	32,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 48

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	13	22,0	22,0	23,7
	Setuju	38	64,4	64,4	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Disposisi/Sikap 49

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	14	23,7	23,7	27,1
	Setuju	35	59,3	59,3	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

d. Hasil Uji Frekuensi Variabel Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi 51

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	13	22,0	22,0	22,0
	Setuju	39	66,1	66,1	88,1
	Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 52

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	9	15,3	15,3	16,9
	Setuju	38	64,4	64,4	81,4
	Sangat Setuju	11	18,6	18,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 53

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	3,4
	Setuju	41	69,5	69,5	72,9
	Sangat Setuju	16	27,1	27,1	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 54

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	5	8,5	8,5	10,2
	Setuju	36	61,0	61,0	71,2
	Sangat Setuju	17	28,8	28,8	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 55

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	3,4
	Setuju	35	59,3	59,3	62,7
	Sangat Setuju	22	37,3	37,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 56

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	4	6,8	6,8	10,2
	Setuju	33	55,9	55,9	66,1
	Sangat Setuju	20	33,9	33,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 57

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	3,4
	Setuju	32	54,2	54,2	57,6
	Sangat Setuju	25	42,4	42,4	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 59

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	11	18,6	18,6	22,0
	Setuju	42	71,2	71,2	93,2
	Sangat Setuju	4	6,8	6,8	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 61

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	5,1	5,1	5,1
	Ragu-ragu	9	15,3	15,3	20,3
	Setuju	39	66,1	66,1	86,4
	Sangat Setuju	8	13,6	13,6	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 62

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	12	20,3	20,3	23,7
	Setuju	36	61,0	61,0	84,7
	Sangat Setuju	9	15,3	15,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Struktur Birokrasi 63

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	12	20,3	20,3	23,7
	Setuju	41	69,5	69,5	93,2
	Sangat Setuju	4	6,8	6,8	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

e. Hasil Uji Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan 64

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	1	1,7	1,7	5,1
	Setuju	26	44,1	44,1	49,2
	Sangat Setuju	30	50,8	50,8	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 65

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	6,8
	Setuju	36	61,0	61,0	67,8
	Sangat Setuju	19	32,2	32,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 66

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Ragu-ragu	9	15,3	15,3	16,9
Setuju	35	59,3	59,3	76,3
Sangat Setuju	14	23,7	23,7	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 67

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
Ragu-ragu	16	27,1	27,1	30,5
Setuju	34	57,6	57,6	88,1
Sangat Setuju	7	11,9	11,9	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 68

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
Ragu-ragu	4	6,8	6,8	10,2
Setuju	39	66,1	66,1	76,3
Sangat Setuju	14	23,7	23,7	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 69

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Tidak Setuju	2	3,4	3,4	5,1
Ragu-ragu	7	11,9	11,9	16,9
Setuju	36	61,0	61,0	78,0
Sangat Setuju	13	22,0	22,0	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 70

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Ragu-ragu	1	1,7	1,7	3,4
Setuju	45	76,3	76,3	79,7
Sangat Setuju	12	20,3	20,3	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 71

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	6	10,2	10,2	11,9
	Setuju	46	78,0	78,0	89,8
	Sangat Setuju	6	10,2	10,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 72

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	6	10,2	10,2	13,6
	Setuju	42	71,2	71,2	84,7
	Sangat Setuju	9	15,3	15,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 73

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
	Ragu-ragu	7	11,9	11,9	15,3
	Setuju	41	69,5	69,5	84,7
	Sangat Setuju	9	15,3	15,3	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 74

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	13	22,0	22,0	23,7
	Setuju	39	66,1	66,1	89,8
	Sangat Setuju	6	10,2	10,2	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 75

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
	Ragu-ragu	2	3,4	3,4	5,1
	Setuju	46	78,0	78,0	83,1
	Sangat Setuju	10	16,9	16,9	100,0
	Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 76

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	2	3,4	3,4	3,4
Ragu-ragu	6	10,2	10,2	13,6
Setuju	36	61,0	61,0	74,6
Sangat Setuju	15	25,4	25,4	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 77

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Ragu-ragu	10	16,9	16,9	18,6
Setuju	36	61,0	61,0	79,7
Sangat Setuju	12	20,3	20,3	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 79

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Ragu-ragu	7	11,9	11,9	13,6
Setuju	41	69,5	69,5	83,1
Sangat Setuju	10	16,9	16,9	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Implementasi Kebijakan 80

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1,7	1,7	1,7
Tidak Setuju	1	1,7	1,7	3,4
Ragu-ragu	15	25,4	25,4	28,8
Setuju	31	52,5	52,5	81,4
Sangat Setuju	11	18,6	18,6	100,0
Total	59	100,0	100,0	

Hasil Uji Korelasi dengan Aplikasi SPSS versi 15,0

a. Hasil Uji Variabel Komunikasi dan Implementasi Kebijakan

Correlations			Faktor Komunikasi	Implementasi Kebijakan
Spearman's rho	Faktor Komunikasi	Correlation Coefficient	1,000	,587(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	59	59
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,587(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Hasil Uji Korelasi Variabel Sumber Daya dan Implementasi Kebijakan

Correlations			Faktor Sumber Daya	Implementasi Kebijakan
Spearman's rho	Faktor Sumber Daya	Correlation Coefficient	1,000	,769(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	59	59
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,769(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Hasil Uji Korelasi Variabel Disposisi/Sikap dan Implementasi Kebijakan

Correlations			Implementasi Kebijakan	Faktor Disposisi/Sikap
Spearman's rho	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	1,000	,675(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	59	59
	Faktor Disposisi/Sikap	Correlation Coefficient	,675(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Hasil Uji Korelasi Variabel Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan

Correlations

			Faktor Struktur Birokrasi	Implementasi Kebijakan
Spearman's rho	Faktor Struktur Birokrasi	Correlation Coefficient	1,000	,626(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	59	59
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,626(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	59	59

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Analisa Regresi

a. Hasil Uji Analisa Regresi Variabel Komunikasi dan Implementasi Kebijakan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2232,411	1	2232,411	42,297	,000(a)
	Residual	3008,425	57	52,779		
	Total	5240,836	58			

a Predictors: (Constant), Faktor Komunikasi

b Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	18,607	5,504		3,380	,001
	Faktor Komunikasi	,525	,081	,653	6,504	,000

a Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

b. Hasil Uji Analisa Regresi Variabel Sumber Daya dan Implementasi Kebijakan

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3439,118	1	3439,118	108,802	,000(a)
	Residual	1801,717	57	31,609		
	Total	5240,836	58			

a Predictors: (Constant), Faktor Sumber Daya

b Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	--	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	8,255	4,434		1,862	,068
	Faktor Sumber Daya	,976	,094	,810	10,431	,000

a Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

c. **Hasil Uji Analisa Regresi Variabel Disposisi/Sikap dan Implementasi Kebijakan**

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2272,791	1	2272,791	43,648	,000(a)
	Residual	2968,044	57	52,071		
	Total	5240,836	58			

a Predictors: (Constant), Faktor Disposisi/Sikap

b Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	19,407	5,301		3,661	,001
	Faktor Disposisi/Sikap	1,452	,220	,659	6,607	,000

a Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

d. **Hasil Uji Analisa Regresi Variabel Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan**

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1725,465	1	1725,465	27,978	,000(a)
	Residual	3515,370	57	61,673		
	Total	5240,836	58			

a Predictors: (Constant), Faktor Struktur Birokrasi

b Dependent Variable: Implementasi Kebijakan

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	20,901	6,317		3,309	,002
	Faktor Struktur Birokrasi	,945	,179	,574	5,289	,000

a Dependent Variable: Implementasi Kebijakan